



Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Suharto Patih, Miki Indika, Ismi Talia

Fakultas Ekonomi, Universitas Muli Rawas, Indonesia

*Corresponding author: @email : miki.unmura@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Department of Village Community Empowerment, Women's Empowerment and Child Protection, North Musi Rawas Regency. The data analysis technique used is descriptive. Based on the results of the research, the financial performance of the Village Community Empowerment, Women's Empowerment and Child Protection Office of North Musi Rawas Regency seen from the analysis of spending variance in 2016-2019 in general can be said to be good. This is indicated by the average realization target of 81.06%, and indicated by the absence of expenditure realization that exceeds the budget in each fiscal year and has made efficiency or budget savings

Keywords: Financial Performance, Financial ratio

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari analisis varians belanja pada tahun 2016-2019 secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi sebesar 81,06%, dan ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja pada setiap tahun anggaran dan sudah melakukan efisiensi atau penghematan anggaran.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

Diterima : 27 September 2021

Review Akhir : 13 Maret 2022

Diterbitkan online : April 2022

PENDAHULUAN

Terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan transformasi dari pemerintahan yang bersifat setralistik menjadi desentralistik, kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat basis perekonomian daerah guna menuju era globalisasi. Kebijakan otonomi daerah ini disambut baik oleh daerah yang memiliki sumber daya melimpah dan kemampuan fiskal yang tinggi, namun dilain sisi kebijakan ini sulit diterima oleh beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah dikarenakan kurangnya sumber daya ekonomi.

Belanja daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari rekening umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali pada periode anggaran. Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Belanja tidak sama dengan pengeluaran daerah, karena tidak semua pengeluaran pemda menjadi pengurang kas di rekening kas umum daerah. Belanja diklasifikasikan menjadi tiga yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti anggaran belanja dari objek yang diteliti. Salah satu alat ukur yang digunakan yaitu analisis belanja adalah Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja (Mahmudi, 2019).

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A). Dinas ini adalah lembaga teknis daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa serta dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mengukur kinerja DPMDP3A dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan. Salah satu dapat dilakukan analisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah digambarkan dalam tahun anggaran tertentu. Pada dasarnya laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Dpmdp3a Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016 – 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2016	4.785.182.500,00	3.433.748.000,00	71,75%
2017	4.788.212.000,00	3.769.997.000,00	78,73%
2018	5.598.798.000,00	4.496.328.660,00	80,31%
2019	5.242.115.300,00	4.900.404.798,00	93,49%

Sumber : Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3A

Berdasarkan tabel 1 dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja di tahun 2016 sampai dengan 2017 target yang lebih kecil dari tahun 2018 dan 2019, yaitu dengan persentase pencapaian sebesar 71,75% dan 78,73. Meskipun apabila dilihat berdasarkan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan kecilnya persentase realisasi anggaran tahun 2016 dan 2017 tersebut peneliti ingin melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan pada DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016-2019. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan Laporan Realisasi Anggaran DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara pada tabel I berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan pemerintah daerah terhadap anggaran. DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran belanja.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Menurut Sutrisno (2009) kinerja keuangan merupakan prestasi yang telah dicapai perusahaan atau organisasi pada suatu periode tertentu sebagai cerminan tingkat kesehatan perusahaan atau organisasi tersebut. Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas yang sedang berjalan pada periode waktu tertentu.

Proses mengkaji secara komprehensif laporan keuangan pemerintah pada suatu periode atau usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia merupakan perwujudan pengelolaan pemerintah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif dan akuntabel. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap anggaran belanja daerah.

Menurut Mahmudi (2019) Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Terdapat berbagai macam analisis rasio keuangan, antara lain: Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Analisis Efisiensi Belanja.

1. Analisis Varians Belanja

Mahmudi (2019) mendefinisikan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Selisih realisasi belanja yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamankan dalam anggaran.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber : Mahmudi (2019)

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Mahmudi (2019) analisis ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasa dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi (2019)

3. Analisis Keserasian Belanja

Mahmudi (2019) mendefenisikan sebagai analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja langsung jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung tidak baik, demikian sebaliknya. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut :

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi.

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.

c. Analisis Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

d. Analisis Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja dalam APBD. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisiensi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- (a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
- (b) Jika hasil perbandingan antara 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.
- (c) Jika hasil perbandingan antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien.
- (d) Jika hasil perbandingan antara 60%-80%, maka dikatakan efisien.
- (e) Jika hasil perbandingan antara 60%, maka dikatakan sangat efisien

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kinerja keuangan pada DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016-2019 kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data kuantitatif.

Untuk pengukuran variabel kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

1. Analisis Varians Belanja

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja}_t = \frac{\text{Realisasi Belanja}_t - \text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja}_{t-1}}$$

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja mencakup :

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

c. Analisis Belanja Langsung

$$\text{Rasio belanja langsung terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

d. Analisis Belanja Tidak Langsung

$$\text{Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diberikan DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja Keuangan Dinas. Laporan Realisasi menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas yang utama, karena anggaran merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah.

1) Analisis Varians Belanja

Hasil dari perhitungan Analisis varians belanja dapat dilihat pada tabel VIII di bawah ini:

Tabel 4. Analisis Varians Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja	Perbandingan (%)
2016	4.785.182.500,00	3.433.146.748,00	(1.352.035.752)	71,75%
2017	4.788.212.000,00	3.769.665.997,00	(1.018.546.003)	78,73%
2018	5.598.798.000,00	4.496.328.660,00	(1.102.469.340)	80,31%
2019	5.242.115.300,00	4.900.404.798,00	(341.710.502)	93,48%
Total	20.414.307.800,00	16.599.546.203,00	3.814.761.597	81,06%

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3A

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Hasil dari perhitungan Analisis varians belanja dapat dilihat pada tabel VIII di bawah ini:

Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Belanja

Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Total
Realisasi Belanja	3.433.146.748,00	3.769.665.997,00	4.496.328.660,00	11.699.141.405,00
Realisasi Belanja	3.769.665.997,00	4.496.328.660,00	4.900.404.798,00	13.166.399.455,00
Kenaikan/(Penurunan)	336.519.249,00	1.063.181.912,00	404.076.138,00	1.803.777.299
Rasio Pertumbuhan Belanja	9,80%	19,27%	8,98%	12,68%

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3A

3) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

(a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tabel 6. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Operasi	Analisis Keserasian Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Perbandingan (%)
2016	3.433.146.748,00	3.371.816.748,00	0,9821	98,21
2017	3.769.665.997,00	3.759.665.997,00	0,9973	99,73
2018	4.496.328.660,00	4.448.188.660,00	0,9892	98,92
2019	4.900.404.798,00	4.842.104.798,00	0,9881	98,81
Total	16.599.546.203,00	16.421.776.203,00	3,9577	98,91

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3A

(b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 7. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Operasi	Analisis Keserasian Belanja Modal terhadap Total Belanja	Perbandingan (%)
2016	3.433.146.748,00	61.330.000,00	0,0178	1,78
2017	3.769.665.997,00	10.000.000,00	0,0026	0,26
2018	4.496.328.660,00	48.140.000,00	0,0107	1,07
2019	4.900.404.798,00	58.300.000,00	0,0118	1,18
Total	16.599.546.203,00	177.770.000,00	0,0429	1,07

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3A

(c) Analisis Belanja Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Tabel 8. Analisis Belanja Langsung

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Langsung	Analisis Keserasian Belanja Modal terhadap Total Belanja	Perbandingan (%)
2016	4.785.182.500,00	5.000.000.000,00	1,044	104,4
2017	4.788.212.000,00	4.788.212.000,00	1	100
2018	5.598.798.000,00	4.788.212.000,00	0,8552	85,52
2019	5.242.115.300,00	4.391.000.000,00	0,8376	83,76
Total	20.414.307.800,00	16.599.546.203,00	3,73	93,42

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3A

(d) Analisis Belanja Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Tabel 9. Perhitungan Analisis Belanja Tidak Langsung

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Analisis Keserasian Belanja Modal terhadap Total Belanja	Perbandingan (%)
2016	4.785.182.500,00	0	0	0
2017	4.788.212.000,00	0	0	0
2018	5.598.798.000,00	810.586.000,00	0,1447	14,47
2019	5.242.115.300,00	851.115.300,00	0,1623	16,23
Total	20.414.307.800,00	16.599.546.203,00	0,307	7,67

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3

4) Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 10. Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja	Perbandingan (%)
2016	4.785.182.500,00	3.433.146.748,00	0,7174	71,74%
2017	4.788.212.000,00	3.769.665.997,00	0,7872	78,72%
2018	5.598.798.000,00	4.496.328.660,00	0,8030	80,30%
2019	5.242.115.300,00	4.900.404.798,00	0,9348	93,48%
Total	5.242.115.300,00	4.900.404.798,00	0,9348	93,48%

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3A

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Ringkasan Kinerja Keuangan DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016-2019 (dalam rupiah)

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
1.	Analisis Varians Belanja	81,06%
2.	Analisis Pertumbuhan Belanja	12,68%
3.	Analisis Keserasian Belanja :	
	a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja	98,91
	b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja	1,07
	c. Analisis Belanja Belanja Langsung terhadap Total Belanja	93,42
	d. Analisis Belanja Belanja Langsung terhadap Total Belanja	7,67
4.	Analisis Efisiensi Belanja	93,48%

Diolah dari Data Realisasi Anggaran DPMDP3

1. Analisis Varians Belanja

Jika dilihat dari semua perubahan dari ke tahun dapat dikatakan penyerapan penggunaan anggaran belanja sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase varians belanja mencapai 81,06% dari tahun 2016-2019. Dan jika dilihat dari kriterianya maka varians belanja pada DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara selama empat tahun dapat dikatakan baik karena mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran dengan realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 93,48%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 71,75%. Walaupun sudah melakukan analisis varians belanja, hendaknya tidak terpaku pada persentase yang ada, tetapi juga jumlah nominalnya. Walaupun secara persentase kecil, tetapi jika secara nominal cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerja baik.

Penyerapan anggaran yang terlalu rendah, misalnya 70% justru bisa dinilai jadi kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, misalnya program dan kegiatan yang tidak dijalankan. Dan penurunan penggunaan anggaran juga terjadi karena pembelanjaan yang tidak sepenuhnya memakai anggaran yang ada. Oleh karena itu untuk menghindari kejadian tersebut pemerintah daerah yang tergabung di dalamnya perlu melakukan analisa standar belanja yang akurat sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. pada perhitungan analisis pertumbuhan belanja dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami perubahan, dengan terjadinya naik dan turunnya persentase dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara selama empat tahun anggaran mengalami kenaikan dan penurunan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari penambahan dan pengurangan jumlah anggaran. Jika dilihat dari total keseluruhannya. Jika dilihat dari total keseluruhannya mengalami pertumbuhan sebesar 12,68% dengan anggaran Rp. 1.803.777.299,00. Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2016-2019 terus mengalami perubahan.

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis Belanja Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 0,9821 dengan persentase 98,21%. Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2017 analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 0,9973 atau jika dipersentasekan sama dengan 99,73%. Dapat dilihat pada tabel tahun 2018 analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 0,9892 atau jika dipersentasekan sama dengan 98,92%. Pada tahun 2019 analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 0,9881 atau jika dipersentasekan sama dengan 98,81%. Dapat dilihat dari tabel bahwa DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara selama empat tahun anggaran keserasian belanja operasi terhadap total belanja cukup tinggi jika dipersentasekan cukup tinggi selalu diatas 90% walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Kinerja Keuangan dilihat dari analisis belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan bahwa pencapaian persentase diambil dari belanja operasi.

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 analisis keserasian belanja modal terhadap total belanja sebesar 0,0178 dengan persentase 1,78%. Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2017 analisis keserasian belanja modal terhadap total belanja sebesar 0,0026 atau jika dipersentasekan sama dengan 0,26%. Dapat dilihat pada tabel tahun 2018 analisis keserasian belanja modal terhadap total belanja sebesar 0,0107 atau jika dipersentasekan sama dengan 1,07%. Pada tahun 2019 analisis keserasian belanja modal terhadap total belanja sebesar 0,0118 atau jika dipersentasekan sama dengan 1,18%. Dapat dilihat dari tabel bahwa DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara selama empat tahun anggaran keserasian belanja modal terhadap total belanja mengalami kenaikan dan penurunan persentase, jika dilihat dari persentasi penyerapan dana anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran banyak yang tidak terserap atau teralisasi pada tahun 2016 dan 2017.

c. Analisis Belanja Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa analisis keserasian belanja langsung terhadap total belanja pada tahun 2016 sebesar 1,0044 atau jika dipersentasekan sebesar 104,4%. Pada tabel diatas tahun 2017 analisis keserasian belanja langsung terhadap total belanja yaitu 1 jika dipersentasekan 100%. Pada tahun 2018 analisis keserasian belanja langsung terhadap total belanja 0,8552 atau sebesar 85,52%. Pada tabel diatas tahun 2019 analisis keserasian belanja langsung terhadap total belanja yaitu 0,8337 jika dipersentasekan 83,76%.

d. Analisis Belanja Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Analisis keserasian belanja DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa belanja operasi, belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Analisis keserasian belanja, secara umum terlihat bahwa sebagian terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja operasi. Selama tahun 2016-2019 rata-rata belanja operasi 98,91%. Sedangkan rata-rata belanja modal yaitu 1,07%. Belanja tidak langsung dengan rata-rata 93,42% dan belanja tidak langsung dengan rata-rata 7,67%. Kinerja keuangan dilihat dari analisis keserasian belanja sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi anggaran.

Kinerja keuangan DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari keserasian belanja, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja operasi, dan sisanya untuk belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selama tahun 2016-2019 rata-rata belanja operasi 98,91%. Sedangkan rata-rata belanja modal yaitu 1,07%. Belanja tidak langsung dengan rata-rata 93,42% dan belanja tidak langsung dengan rata-rata 7,67%.

4. Analisis Efisiensi Belanja

Dapat dilihat dari tabel bahwa DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara selama empat tahun anggaran rasio efisiensi belanja mengalami kenaikan persentase disetiap tahunnya dan tingkat penggunaan anggaran pada tahun 2016-2017 efisien, pada tahun 2018 cukup efisien dan tahun 2019 kurang efisien. Untuk penilaian analisis efisiensi belanja dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara sudah efisien pada tahun 2016-2017 dalam pengelola setiap penggunaan anggarannya. Dapat dilihat dari total keseluruhan analisisnya selama empat tahun anggaran yaitu 93,48% bisa dikatakan dalam analisis efisiensi belanja kurang efisien. Untuk hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dapat melakukan penghematan anggaran selama empat tahun anggaran. Jadi Kinerja Keuangan pada DPMDP3 Kabupaten Musi Rawas Utara dianalisis dari rasio efisiensi belanja dikatakan kurang efisien karena menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 bahwa jika hasil perbandingan antara 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.

SIMPULAN

Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari analisis varians belanja pada tahun 2016-2019 secara umum dapat dikatakan baik dilihat dari analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja.

SARAN BAGI PENELITI SELANJUTNYA

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai Kinerja Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat dari pada penelitian oleh penulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Belanja Tahun 2016- 2019. 2020. Musi Rawas Utara: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, Nurlan. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- , 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- , 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat
- Indra Bastian. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016- 2019. 2020. Musi Rawas Utara: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mahsun (Ed). 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad Yogi Perwira. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007-2013. *Jurnal kinerja keuangan*
- Munawir. 2008. *Analisis Rasio Keuangan*. Jakarta
- Nanda Ertina Gabriella Mailoor, Paul David Elia Saerang, Harijanto Sabijono. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur Tahun 2011-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Nur Habibah. 2014. Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013. *Jurnal keuangan Vol No.1*.
- Rudianto. (2013). *Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Warsidi, Bambang & Fahmi. (2011). *Analisis Rasio Keuangan*. Bandung. Alfabeta